

RESPON RUSIA TERHADAP SANKSI EKONOMI UNI EROPA TAHUN 2014-2015

Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: christine_christine12@yahoo.com¹, ratihkumaladewi@unud.ac.id², kawitriresen@unud.ac.id³

ABSTRACT

Economic tensions experienced by Russia due to EU sanctions affect trade relations with the EU. The decline in Russia's export capability has resulted in Russia's trade being much lower than the EU. This positions Russia on a negative trade balance that creates imbalances in the dynamics of Russian and EU trade. Assessing the impact of these economic sanctions, encourages Russia to respond to EU economic sanctions in 2014-2015. The results of this research describe Russia's response to EU economic sanctions by using economic power in the form of economic statecraft. Economic statecraft carried out by Russia is a negative sanction in the form of an embargo on agricultural and food products from EU member countries.

Keywords: *economic sanctions, response, economic statecraft, embagoes*

1. PENDAHULUAN

Rusia melakukan tindakan penaklukan wilayah lain dengan menggunakan kekerasan atau yang disebut dengan aneksasi terhadap wilayah Krimea di Ukraina pada awal Maret tahun 2014. Rusia mengerahkan sekitar 150.000 pasukan militer yang didukung oleh beberapa peralatan lengkap seperti pesawat tempur, empat kapal perang dan delapan ratus tank militer. Jumlah pasukan yang tidak sedikit menyebabkan pasukan Rusia berhasil menguasai sepenuhnya kota-kota penting wilayah Krimea, infrastruktur sipil dan militer wilayah tersebut (Kamasa, 2014). Aneksasi Rusia didorong oleh dua faktor, yakni secara internal dan eksternal.

Tindakan aneksasi Rusia mendapatkan kecaman dari Uni Eropa (UE) karena dianggap melanggar beberapa hal. Pertama, melanggar

empat ketentuan yang diatur dalam hukum internasional di bawah PBB. Kedua, melanggar perjanjian bilateral dengan Ukraina, yakni perjanjian *Cooperation and Partnership Between Ukraine and Russia* tahun 1997 (Merezhko, 2015). Ketiga, melanggar perjanjian multilateral, yaitu *Budapest Memorandum* yang ditandatangani Rusia di tahun 1994. Keempat, tindakan aneksasi Rusia akan membuat eskalasi konflik lebih lanjut dan dapat mengancam keamanan Eropa (Marxsen, 2014). Keempat, aneksasi Rusia menciptakan situasi yang mengancam keamanan regional. Sehingga, UE bertindak untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Bentuk kecaman UE adalah dengan memberikan Rusia empat sanksi. Keempat sanksi yang diberikan atas persetujuan Dewan *Common Foreign and Security Policy* yang

diterapkan secara bertahap. Salah satu sanksi yang diberikan UE, yakni sanksi ekonomi menargetkan pada empat hal. Pada dasarnya target sanksi ekonomi adalah sektor energi. Sanksi ekonomi UE berisikan enam larangan yang terkait sektor energi Rusia.

Penerapan sanksi ekonomi oleh UE menyebabkan perekonomian Rusia mengalami penurunan pada pertengahan tahun 2014 hingga tahun 2015. Selain berdampak pada perekonomian Rusia, sanksi ekonomi UE juga berdampak pada perdagangan Rusia dan UE. Sanksi ekonomi bertanggung jawab atas kira-kira sepertiga dari total penurunan perekonomian Rusia. Selain itu, sanksi tersebut menyebabkan perdagangan Rusia jauh lebih rendah daripada UE. Hal tersebut ditandai dengan tingginya harga impor makanan Rusia yang berasal dari UE akibat jatuhnya nilai rubel (Gross & Mustilli, 2014). Sanksi ekonomi menyebabkan Rusia kehilangan pangsa pasar di UE, sementara pangsa pasar UE justru tetap stabil secara keseluruhan. Gros & Salvo (2014) menyebutkan bahwa jika Rusia tidak bertindak terhadap sanksi ekonomi tersebut, UE akan mendominasi perdagangan kedua pihak. Sehingga, menilai kontribusi sanksi ekonomi terhadap Rusia, sebagai negara yang menjamin kelangsungan hidup (*survival*) dan keamanan (*security*) nya, Rusia kemudian merespon sanksi ekonomi UE.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua tulisan ilmiah dan satu buah buku. Tulisan ilmiah pertama, ditulis oleh Kasmin (2015) yang berjudul Upaya Iran Dalam Mengatasi Embargo

Minyak Uni Eropa pada Tahun 2012. Penelitian Kasmin (2015) membahas tindakan Iran terhadap serangkaian sanksi dan embargo minyak yang diberikan oleh UE pada tahun 2012. Iran diberikan serangkaian sanksi dan embargo minyak oleh UE akibat tindakan negara tersebut mengembangkan program nuklir yang melewati batas kesepakatan *Nuclear Non-Proliferation Treaty*.

Serangkaian sanksi dan embargo minyak yang diberikan UE kepada Iran sebagai bentuk reaksi terhadap peningkatan program nuklir Iran yang melewati kesepakatan NPT. Embargo minyak merupakan reaksi UE yang paling memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Iran. Sebagai negara yang menyandarkan perekonomiannya terhadap sektor migas, embargo minyak UE dengan cepat menurunkan produksi dan transaksi ekspor Iran. Produksi Iran diperkirakan menurun sekitar 9% menjadi rata-rata sekitar 3,3 juta barel per hari. Iran diperkirakan akan kehilangan lebih dari 300 ribu bph dan 200 bph. Sejak diberlakukan embargo, Iran kesulitan untuk mengimpor bahan pangan karena mata uang negara tersebut melemah.

Dampak yang ditimbulkan oleh embargo minyak oleh UE kemudian memosisikan Iran untuk mencari cara agar perekonomian negaranya bisa tetap stabil. Pertama, Iran mengurangi pasokan minyak kepada seluruh negara-negara anggota UE. Kedua, menutup selat Hormuz yang berperan penting bagi pengiriman minyak di dunia yang bertujuan untuk menciptakan krisis minyak di sejumlah negara-negara anggota UE.

Penelitian Kasmin (2015) menggunakan teori Realisme untuk menggambarkan perilaku negara ketika ada tindakan aktor lain yang mengancam kelangsungan hidupnya. Tulisan Kasmin (2015) memperlihatkan bahwa Iran melakukan suatu tindakan terhadap embargo minyak UE yang telah menyebabkan Iran mengalami penurunan dan ketidakstabilan ekonomi. Tulisan Kasmin (2015) membantu Peneliti untuk melihat bahwa negara akan melakukan suatu tindakan terhadap tindakan aktor lain yang telah menyebabkan negara tersebut mengalami tekanan ekonomi.

Kajian pustaka kedua, tulisan dari Aigerim Raimzhanova (2015) yang berjudul *Power in IR: Hard, Soft, and Smart*. Raimzhanova (2015) membahas mengenai kedudukan kekuatan ekonomi dalam HI. Pada abad ke-21, dunia sedang mengalami transformasi kekuatan atau *power*. Raimzhanova (2015) menyebutkan bahwa *power* saat ini tidak lagi mengarah pada kekuatan militer yang telah menjadi kekuatan utama dalam HI.

Raimzhanova mengklasifikasikan tiga *power* dalam Hubungan Internasional, *hard power*, *soft power* dan *smart power*. *Hard power* diartikan sebagai bentuk kekuatan yang tertua karena kekuatan ini terhubung dengan gagasan bahwa sistem internasional anarkis. Salah satu kekuatan yang juga masuk ke dalam *hard power*, yakni kekuatan ekonomi. Masuknya kekuatan ekonomi ke dalam *hard power*, menyebabkan kekuatan ekonomi yang memiliki kedudukan setara dengan kekuatan militer.

Raimzhanova (2015) menyebutkan bahwa *hard power* didefinisikan sebagai kemampuan

untuk mencapai tujuan seseorang melalui tindakan bujukan atau ancaman yang memaksa. Tindakan ancaman yang memaksa dapat menggunakan kekuatan militer seperti persenjataan militer atau kekuatan ekonomi. Raimzhanova (2015) menggunakan konsep *Power* untuk menggambarkan kedudukan kekuatan ekonomi yang setara dengan kekuatan militer dalam HI, yakni sebagai *hard power* yang dapat digunakan sebagai tindakan ancaman memaksa untuk menggapai suatu tujuan. Tulisan Raimzhanova (2015) memberikan kontribusi kepada Peneliti dalam melihat bahwa kekuatan ekonomi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kekuatan militer.

Kajian pustaka ketiga diambil dari buku yang berjudul *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatahan Dunia 2* yang ditulis oleh Walter S. Jones pada tahun 1988. Jones (1998) membahas mengenai tindakan Jepang yang dapat mengimbangi perdagangan Amerika Serikat menggunakan kekuatannya. Negara tersebut merupakan salah satu negara yang meraih status kekuatan utama akibat kebangkitan kekuatannya yang hanya berada di bawah Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Jepang, dengan kekuatannya mampu menembus dominasi perdagangan Amerika Serikat. Hal tersebut ditandainya dengan kemampuan Jepang menjadi pemasok utama barang-barang industri yang dominan di seluruh Asia. Jepang membuktikan bahwa dengan kekuatannya, negara tersebut

mampu memimpin Asia dan Pasifik dan berhasil menandingi dominasi Amerika Serikat dalam perdagangan. Hal tersebut membuktikan bahwa tanpa kekuatan militer, Jepang mampu bersaing di pasar-pasar dunia. Jones (2008) dalam tulisannya menggunakan konsep *Balance of Power* (BoP) untuk menggambarkan tindakan Jepang yang mengimbangi dominasi perdagangan Amerika Serikat melalui kekuatan ekonomi. Tulisan Jones (2008) memberikan kontribusi terhadap penelitian ini untuk melihat bahwa kekuatan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu BoP pasca Perang Dingin.

Peneliti, dalam penelitian ini menggunakan satu teori dan dua konsep, yakni teori realisme, konsep power dan Balance of Power (BoP). Teori Realisme digunakan dalam menggambarkan perilaku negara terhadap tindakan atau ancaman yang ditimbulkan oleh aktor lain yang mengancam kelangsungan hidup (*survival*). Jackson & Sorensen (2013) menyebutkan bahwa salah satu asumsi dasar realisme adalah menunjang tinggi keamanan nasional (*security*) dan kelangsungan hidup (*survival*). Aspek terpenting bagi realisme adalah bagaimana negara berusaha untuk mempertahankan keberadaannya (*survive*). Sehingga, negara sebagai entitas yang independen akan melakukan berbagai cara untuk menjamin dua hal tersebut dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Sanksi ekonomi UE yang menargetkan pada sektor energi, menyebabkan Rusia mengalami stagnasi dan resesi ekonomi selama satu tahun. Sanksi ekonomi mengancam kelangsungan hidup (*survival*), khususnya

sektor finansial Rusia. Negara tersebut kemudian bertindak terhadap sanksi ekonomi UE untuk menjamin kelangsungan hidupnya (*survival*).

Konsep *power* digunakan untuk menggambarkan kekuatan ekonomi dapat menjadi ancaman eksplisit bagi aktor lain. Couloumbis & Wolfe dalam Triwahyuni (n.d) menyebutkan bahwa *power* terdiri dari tiga unsur, yakni *force*, *authority* dan *influence*. Argumen Couloumbis & Wolfe yang menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi masuk ke dalam unsur pertama *power*, yakni *force* membuktikan bahwa secara umum kekuatan ekonomi berada di posisi yang sama dengan kekuatan militer, yakni dapat menjadi suatu ancaman. Sehingga, negara memaksimalkan *power* yang dimiliki untuk mempengaruhi tindakan aktor lain.

Konsep BoP digunakan untuk menggambarkan perilaku mengimbangi yang dilakukan negara terhadap ancaman yang ditimbulkan aktor lain. BoP memiliki dua syarat menurut Waltz (Paul, Fortman & Wirtz, 2004), yakni (1) tatanan dunia yang bersifat anarkis dan (2) tatanan yang dipenuhi oleh aktor atau unit lain yang selalu ingin mempertahankan hidupnya (*survival*). Sehingga, BoP didasarkan pada anggapan bahwa negara berusaha bertahan sebagai entitas yang independen.

Pada dasarnya, BoP bertumpu pada kekuatan militer. Hal tersebut disebabkan karena kekuatan militer merupakan sumber kekuatan yang paling kuat. Namun, perubahan pada kekuatan (*power*) Pasca Perang Dingin menjadikan kekuatan ekonomi sebagai faktor

determinan dalam pembentukan BoP. Kekuatan ekonomi semakin saling terkait dengan faktor-faktor politik dan menjadi isu high politics, yakni sama pentingnya dengan keamanan (Wenger & Zimmerman, 2003). Cooper (2004) menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi menjadi faktor penting ketika menilai status kekuatan suatu negara di dunia.

Ketegangan ekonomi yang dialami Rusia berdampak pada perdagangan Rusia dan UE. Akibat ketegangan tersebut, perdagangan Rusia jauh lebih rendah daripada UE. Situasi tersebut menciptakan ketidakseimbangan pada dinamika perdagangan Rusia dan UE. Ketidakseimbangan yang menempatkan Rusia pada neraca perdagangan negatif. Sehingga, untuk menyeimbangkan kembali, Rusia akan melakukan satu atau berbagai cara untuk memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi, salah satunya adalah dengan mengembargo produk pertanian dan makanan UE yang menjadi impor Rusia.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berjenis deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan respon Rusia terhadap sanksi ekonomi UE tahun 2014-2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang akan di peroleh dari berbagai literature terkait topik penelitian. Menurut Somantri (2005) salah satu bentuk sumber data sekunder, yaitu melalui dokumen.

Penelitian ini menggunakan tingkatan analisa sistem internasional karena melihat interaksi aktor-aktor HI yang terlibat di

dalamnya, yakni aksi-reaksi. Tindakan aksi suatu negara melakukan tindakan agresi serta aneksasi di wilayah negara lain, direspon oleh OI dengan memberikan sanksi ekonomi sebagai bentuk reaksi. Kemudian, dampak sanksi ekonomi di respon kembali oleh negara target sebagai bentuk reaksi.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian dokumentasi melalui studi kepustakaan yang lebih menekankan pada pencarian data lewat informasi yang terdapat dalam buku, jurnal ataupun laporan-laporan dari pemerintah terkait.

Teknik penyajian data yang digunakan pada penelitian ini adalah secara narasi ataupun berupa gambar, grafik, tabel dan diagram. Hasil analisa data penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi dan dibagi ke dalam beberapa sub bab terkait. Sub bab pertama akan menggambarkan mengenai gambaran umum objek penelitian. Sub bab kedua akan menggambarkan hasil temuan dengan menggunakan konsep yang telah ditentukan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah perilaku objek penelitian merespon sanksi ekonomi UE dengan memaksimalkan kekuatan ekonomi untuk mengimbangi sanksi ekonomi UE. Salah satu perilaku negara untuk menyeimbangkan sanksi ekonomi yang diterima akan dianalisa oleh Teori Realisme, konsep *power* dan konsep BoP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis internal Ukraina yang terjadi pada tahun 2013 merupakan pemicu dari tindakan Rusia menganeksasi wilayah Krimea di Ukraina. Krisis tersebut terjadi dilatarbelakangi

oleh keputusan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich yang secara sepihak membatalkan untuk menandatangani pakta kerja sama *EU-Ukraine Association Agreement* antara UE dan Ukraina. Pembatalan tersebut diawali ketika Ukraina mengalami masalah ekonomi, Yanukovich diberikan dua pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut (Fitri, 2017) Pertama, diberi pinjaman oleh UE dan bersedia untuk bergabung sebagai anggota UE. Kedua, menerima bantuan pinjaman dari Rusia dan juga diberi potongan harga gas bumi. Yanukovich akhirnya memilih pinjaman dari Rusia dan juga memilih negara tersebut sebagai mitra dagangnya setelah melalui empat serangkaian negosiasi. Penandatanganan naskah kerja sama JAP dilakukan dalam persidangan ke-6 Komite Kerja Sama antara Rusia-Ukraina (Fadly, 2015).

Keputusan Presiden Ukraina tersebut menyebabkan masyarakat Ukraina melakukan demonstrasi. Demonstrasi kemudian meluas untuk memberhentikan rezim pemerintahan Yanukovich sebagai Presiden Ukraina ketika diadakannya mosi tidak percaya kepada pemerintah (Oktaviano & Fachri, 2015). Yanukovich kemudian menulis surat untuk Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan bahwa kondisi di Ukraina sedang tidak kondusif dan wilayah Krimea terancam. Selain itu, Yanukovich meminta bantuan untuk melindungi masyarakat sipil dan ketertiban di Ukraina dengan mengirimkan pasukan militer.

Pemerintahan Ukraina yang baru lebih condong kepada Barat dan UE. Kebijakan yang dikeluarkan mengandung perlawanan terhadap

Rusia (Rahmaidah, 2016). Kebijakan tersebut, yakni pembatasan hak-hak politik bagi masyarakat beretnis Rusia serta larangan untuk menggunakan bahasa Rusia di Ukraina. Kebijakan tersebut dianggap Rusia sebagai bentuk ancaman bagi wilayah Krimea sebagai satu-satunya wilayah di Ukraina yang beretnis Rusia. Rusia kemudian memenangkan veto di parlemen untuk mengintervensi konflik internal Ukraina lebih jauh, yakni dengan mengerahkan 150.000 pasukan militer ke wilayah Krimea pada awal Maret 2014 (Lembaga Kajian Syamina, 2014). Jumlah pasukan yang tidak sedikit menyebabkan Rusia mampu menguasai sepenuhnya kota-kota penting, instalasi strategis, infrastruktur sipil dan militer wilayah Krimea. Selain itu, pasukan Rusia juga telah memblokir seluruh wilayah Krimea termasuk blockade di laut.

Ada dua faktor yang melatarbelakangi tindakan aneksasi Rusia. Pertama, secara internal, Rusia menginginkan wilayah Krimea yang pernah menjadi bagian dari Sosialis Soviet Rusia sejak tahun 1920 untuk bergabung kembali menjadi bagian dari Federasi Rusia. Wilayah Krimea diberikan kepada Soviet Ukraina oleh Nikita Khrushchev pemimpin Uni Soviet saat itu. Wilayah Krimea kemudian berada di bawah kedaulatan Ukraina ketika negara tersebut merdeka pada tahun 1991 dan diakui sebagai pembagian administratif Ukraina serta diakui secara internasional (Matzek, 2016). Secara eksternal, kudeta pemerintahan di Kiev menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik di Ukraina. Konflik internal Ukraina yang meluas menjadi konflik ideologi, yakni pro-UE

dan pro-Rusia. Pemerintahan Ukraina yang baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendiskriminasi masyarakat Krimea. Sehingga, Rusia melakukan tindakan aneksasi untuk menyelamatkan hidup serta hak masyarakat Krimea.

Penggulingan Viktor Yanukovych secara illegal mendorong masyarakat Krimea melakukan resolusi *referendum*. *Referendum* tersebut sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap penggulingan tersebut. Tanggal 16 Maret 2014, masyarakat Krimea mengadakan *referendum* untuk memilih nasib wilayah Krimea. Hasil *referendum* menyatakan bahwa sekitar 96,77% masyarakat Krimea ingin bergabung kembali menjadi bagian dari Federasi Rusia. Rusia kemudian menandatangani UU penggabungan wilayah Krimea ke Rusia. Sehingga, secara de facto, wilayah Krimea berada pada kedaulatan Rusia.

Tindakan aneksasi Rusia melanggar beberapa ketentuan hukum internasional di bawah Piagam PBB. Pertama, prinsip non intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional yang berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan teritorial negara yang termanifestasikan dalam Pasal 2 (7) Piagam PBB (Gerdzhikova, 2015). Kedua, Rusia melanggar Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 Tentang *Declaration on Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and The Protection of Their Independence and Sovereignty* pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa melarang setiap negara melakukan intervensi dengan alasan apapun terhadap persoalan internal dan

eksternal dari negara lain. Ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Ramah dan Kerja sama antar Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB. Larangan penggunaan kekuatan diwujudkan dalam Pasal 2 (4) Piagam PBB yang menyebutkan bahwa semua anggota PBB harus menahan diri dari ancaman atas penggunaan terhadap integritas teritorial negara manapun atau melakukan apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Keempat, melanggar Resolusi 3344 yang dikeluarkan pada tahun 1974 mengenai tindakan agresi.

Rusia juga melanggar perjanjian bilateral dan multilateral. Secara bilateral, Rusia melanggar perjanjian dengan Ukraina, yakni *The 1997 Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership between Russia and Ukraine*. Perjanjian ini membangun hubungan timbal balik berdasarkan prinsip saling menghormati atas kesetaraan, kedaulatan, integritas teritorial, melakukan penyelesaian perselisihan dengan damai, serta tidak menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan termasuk dengan cara ekonomi dan lainnya (Posner, 2014). Secara multilateral, Rusia melanggar perjanjian *Budapest Memorandum* pada tahun 1994 mengenai jaminan keamanan bagi Ukraina (Marxsen, 2014). Rusia, dalam perjanjian tersebut mengukuhkan kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina sebagai negara merdeka.

Selain itu, aneksasi Rusia dianggap akan mengancam keamanan serta perdamaian di Eropa, yakni akan menyebabkan eskalasi

konflik lebih jauh. Negara-negara anggota UE, dalam pembentukan UE memiliki tujuan untuk menjamin keamanan serta perdamaian di Eropa. Sehingga, UE bertindak untuk mengatasi tindakan aneksasi Rusia. Bentuk kebijakan UE adalah dengan memberikan serangkaian sanksi atas persetujuan Dewan *Common Foreign and Security Policy*. Pada tahap pertama dan kedua, UE menerapkan sanksi diplomatik-politik serta pembekuan aset dan visa yang diberlakukan pada Maret 2014, kemudian dilanjutkan dengan sanksi pembatasan Sevastopol dan Krimea. UE memperluas sanksi dengan memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang diberlakukan pada Juli 2014 (Veebel, 2015).

Sanksi ekonomi UE merupakan sanksi yang paling memberikan dampak besar bagi perekonomian Rusia. Hal tersebut disebabkan karena sanksi ekonomi pada dasarnya menargetkan pada sektor energi yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Rusia dan faktor penggerak utama dalam perdagangan Rusia dan UE. Ada enam larangan dalam sanksi ekonomi UE, yaitu (1) larangan UE kepada negara-negara anggota beserta perusahaan di dalamnya untuk tidak lagi melakukan bisnis di Rusia, (2) pembatasan akses Rusia ke pasar modal UE (3) larangan ekspor, menjual atau memasok teknologi senjata ganda dari UE ke Rusia, yakni barang-barang industri sipil yang digunakan sebagai persenjataan untuk tujuan militer dengan sembilan perusahaan Rusia. Pada larangan ini juga diterapkan larangan untuk memberikan bantuan teknis terkait teknologi senjata ganda,

(4) larangan ekspor peralatan yang berhubungan dengan energi tertentu atau teknologi untuk Rusia. Larangan tersebut bertujuan agar Rusia tidak dapat melakukan pengeboran dan pengujian untuk mengembangkan cadangan minyak atau melakukan proyek yang berpotensi untuk menghasilkan minyak, (5) Rusia dilarang untuk mengeksplorasi minyak di daerah lepas pantai utara lingkaran Arktik dan melakukan eksplorasi minyak di perairan yang lebih dalam dari 150 meter dan (6) memberlakukan *blacklist* terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan gas Rusia (European Union, n.d).

Dampak yang dialami Rusia akibat sanksi ekonomi, yakni sebuah perlambatan ekonomi, depresiasi rubel, tekanan terhadap anggaran serta memburuknya neraca keuangan Rusia (European Parliament, 2016). Menurut *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade* (n.d), Rusia mengalami penurunan pada PDB negara tersebut menurun menjadi sekitar US\$ 2.063,7 dan menurunkan kembali menjadi US\$ 1.365,9 pada tahun 2015. Sedangkan untuk PDB per kapita Rusia memiliki sekitar 16.022,7 pada tahun 2013. Sanksi ekonomi kemudian menurunkan PDB per kapita Rusia selama satu tahun, yakni menjadi US\$ 14.388,0 pada tahun 2014 dan menurun kembali menjadi US\$ 9.521,1 pada tahun 2015. Real GDP Growth Rusia menurun tajam berada pada titik -3.0%.

Sanksi ekonomi menyebabkan FDI UE dalam ekonomi Rusia menurun sebesar 44% pada tahun 2014 (Nevskaya, 2016). Produksi minyak di Rusia penting bagi pasar energi

global, yakni negara tersebut memiliki sekitar 12% pangsa output untuk minyak dunia kedua setelah Arab Saudi (Henderson, 2015). Sanksi ekonomi UE menyebabkan harga minyak dunia turun sekitar 50% pada pertengahan tahun 2014. Dinamika harga minyak secara langsung mempengaruhi stabilitas anggaran Rusia. Harga minyak sebelum sanksi ekonomi pada bulan Januari 2014 adalah di atas \$ 110 per barel. Kemudian, harga minyak menurun mendekati \$60 dari bulan Juli sampai Desember 2014 (World Economic Forum, 2015).

Sanksi ekonomi UE juga berdampak terhadap dana cadangan Rusia. Dana cadangan Rusia yang diinvestasikan ke dalam dolar, euro dan sterling menurun selama satu tahun, yakni dari awal Maret 2014 hingga awal April 2015. Total penurunan pada awal Maret 2014 adalah 87.5, sedangkan untuk awal April 2015 adalah 75.7 (Simola, 2015). Perdagangan Rusia akibat sanksi ekonomi mengalami penurunan dari EUR 326 miliar menjadi EUR 285 miliar (European Leadership Network, 2017). Nilai mata uang Rusia mengalami penurunan terhadap nilai mata uang lain, yang disebut dengan depresiasi rubel. Rubel Rusia menurun sekitar 50% terhadap dolar dan 34% terhadap euro (Smith & Nugee, 2015). Selain itu, cadangan devisa Rusia juga mengalami penurunan

Sanksi ekonomi UE juga berdampak terhadap dinamika perdagangan Rusia dan UE. Ketegangan ekonomi di Rusia menyebabkan perdagangan Rusia jauh lebih rendah dari UE. Hal tersebut dilihat dari GDP Rusia yang

menurun tajam sedangkan GDP UE cenderung stabil hingga tahun 2015. Hal tersebut menciptakan ketidakseimbangan terhadap dinamika perdagangan kedua pihak. Situasi tersebut mengakibatkan UE mendominasi dinamika perdagangan kedua pihak (Gross & Salvo, 2017). Menilai kontribusi sanksi ekonomi UE terhadap dua hal tersebut, Rusia kemudian merespon sanksi ekonomi UE pada pertengahan tahun 2014.

Aspek terpenting bagi Realisme adalah bagaimana negara berusaha untuk mempertahankan keberadaannya (*survive*). Hutori menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat membantu negara untuk menjamin keberadaannya (*survive*) dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi dan SDA memiliki kaitan yang erat, yakni secara teoritis SDA dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Energi sebagai salah satu SDA memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, yakni menggerakkan roda perekonomian negara karena energi berkontribusi terhadap pendapatan suatu negara (Wardhani, 2015).

Pentingnya peran energi bagi perekonomian negara, sama pentingnya dengan Rusia. Kepemilikan sektor energi yang melimpah menjadikan Rusia sebagai negara yang kaya secara finansial. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Rusia di dorong oleh ekspor energi, yakni sekitar 70% pendapatan berasal dari minyak (OSW Report, 2015). Besarnya kontribusi energi pada perekonomian Rusia, menjadikan energi sebagai faktor kelangsungan hidup

(*survival*) negara tersebut. Namun, sanksi ekonomi UE yang menyebabkan Rusia mengalami ketegangan ekonomi, mengancam kelangsungan hidup (*survival*) dan keamanan (*security*) negara tersebut khususnya pada sektor finansial.

Ketika negara mendapatkan tindakan berupa ancaman yang mengancam kelangsungan hidup (*survival*) dan keamanan (*security*), Waltz dalam Sheehan (1996) menjelaskan bahwa negara, pada dasarnya, untuk tetap bisa bertahan (*survive*), akan berfungsi secara fungsional, yakni berperilaku dengan cara yang sama atau serupa. Tujuannya adalah untuk mengimbangi tindakan atau ancaman yang ditimbulkan oleh aktor lain. Argumen Waltz dalam Sheehan (1996) tersebut menggambarkan bagaimana Rusia merespon sanksi ekonomi UE yang telah menyebabkan negara tersebut mengalami krisis ekonomi dan posisi yang merugikan pada dinamika perdagangan dengan UE. Respon Rusia adalah dengan memberikan sanksi yang sama, yakni sanksi ekonomi berupa embargo. Tujuan Rusia merespon dengan cara tersebut adalah, menurut pernyataan Putin selaku Presiden Rusia dalam Gross & Salvo (2017) akan membawa UE pada posisi yang sama dengan Rusia.

Perilaku menyeimbangkan tindakan atau ancaman dari aktor lain pada dasarnya bertumpu pada kekuatan (*power*) militer. Namun, Wenger & Zimmerman (2003) menyebutkan bahwa pasca Perang Dingin, terjadinya pergeseran kekuatan (*power*) utama, yakni militer ke ekonomi. Pergeseran tersebut

menjadikan kekuatan (*power*) ekonomi memiliki posisi yang setara dengan militer. Jones (1998) menyebutkan bahwa kekuatan (*power*) ekonomi kemudian menjadi faktor determinan untuk menyeimbangkan ancaman aktor lain. Argumen Jones (1998) menggambarkan respon Rusia terhadap sanksi ekonomi UE, yakni dengan menggunakan kekuatan ekonomi. Sebagai negara yang memiliki indeks kekuatan militer terbesar di dunia setelah AS, Rusia, dalam merespon sanksi ekonomi UE tidak mengambil langkah dengan menggunakan kekuatan militer, melainkan dengan menggunakan kekuatan ekonomi berupa sanksi ekonomi berupa embargo.

Dampak eksternal akibat sanksi ekonomi, yakni memposisikan Rusia pada neraca perdagangan negatif dalam dinamika perdagangan Rusia dan UE, menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan tersebut. Ketidakseimbangan tersebut ditandai dengan perdagangan Rusia jauh lebih rendah dari UE. Situasi tersebut mengakibatkan UE mendominasi dinamika perdagangan kedua pihak (Gross & Salvo, 2017). Jones (1998) menyebutkan bahwa pergeseran kekuatan pasca Perang Dingin menyebabkan kekuatan ekonomi menjadi faktor determinan dalam pembentukan BoP. Sehingga, untuk menyeimbangkannya, Rusia menggunakan kekuatan ekonomi dengan melakukan *economic statecraft* berupa sanksi negatif. Rusia, dengan mempertimbangkan ketergantungan perdagangan dengan negara-negara anggota UE dan sebagai mitra dagang terbesar kedua untuk produk agrikultur dan

makanan tertentu UE, memutuskan untuk merespon dengan melakukan sanksi negatif, yakni embargo produk agrikultur dan makanan tertentu yang menjadi impor Rusia. Semua negara-negara anggota UE berada di bawah embargo Rusia.

Keputusan Rusia untuk menerapkan embargo terhadap negara-negara anggota UE, diterapkan secara bertahap melalui empat surat keputusan. Surat keputusan pertama, pada tanggal 6 Agustus 2014 No. 560 yang menyatakan langkah ekonomi khusus untuk melindungi keamanan nasional Rusia. Surat pertama berisikan langkah awal untuk merespon sanksi ekonomi dengan menetapkan langkah-langkah yang dilakukan, Rusia melanjutkan dengan menandatangani surat keputusan kedua pada tanggal 7 Agustus 2014 No. 778 yang mendefinisikan daftar produk yang menjadi target embargo Rusia dari negara-negara yang memberikan sanksi ekonomi, khususnya bagi anggota negara-negara UE (Kapsdorferova & Sviridova, 2014).

The Customs Union commodity code	Name of product(*)****)
0201	Meat of cattle, fresh or cooled
0202	Meat of cattle, frozen
0203	Pork, fresh, cooled or frozen
0207	Meat and edible offal of fowl, listed in commodity item 0105, fresh, cooled or frozen
from 0210**	Salted, in brine, dried or smoked meat
0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	Fish and crustaceans, mollusks and other water invertebrates
0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406	Milk and dairy products
0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714	Vegetables, edible roots and tuber crops
0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813	Fruits and nuts
1601 00	Sausage and analogous meat and blood products, other same food products
1901 90 110 0, 1901 90 910 0	Prepared products, including cheese and curd of vegetable fat
2106 90 920 0, 2106 90 980 4, 2106 90 980 5, 2106 90 980 9	Food products (products, contained milk of vegetable fat)

Setelah mengeluarkan surat keputusan pertama dan kedua, Rusia kembali mengeluarkan surat keputusan ketiga No. 830 pada tanggal 20 Agustus 2014 berisikan perubahan pada daftar produk susu. Produk susu yang diembargo adalah susu bebas laktosa. Rusia menindaklanjuti perubahan pada surat keputusan ketiga dengan mengeluarkan surat keputusan keempat tanggal 25 Juni 2015 No. 625. Sebagai langkah akhir, Rusia mengeluarkan keputusan mengenai penghancuran produk agrikultur dan makanan yang menjadi target embargo yang sudah berada di Rusia.

Keputusan Rusia untuk merespon dengan menerapkan embargo, bertujuan untuk mengimbangi sanksi ekonomi UE dan menempatkan UE pada posisi yang sama dengan Rusia. Perilaku Rusia untuk mengimbangi sanksi ekonomi UE dengan memberikan sanksi serupa, menurut Mingst (2003) dapat dilakukan dengan *economic statecraft*, yakni sanksi negatif berupa embargo produk agrikultur dan makanan UE.

5. KESIMPULAN

Kekuatan ekonomi yang juga bagian dari *hard power*, memiliki kedudukan yang setara dengan kekuatan militer, yakni dapat menjadi ancaman eksplisit bagi negara dalam menguasai atau mengawasi perilaku negara lain. Kedudukan yang setara tersebut menyebabkan kekuaran ekonomi menjadi faktor yang determinan dalam pembentukan *Balance of Power*. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa respon Rusia

terhadap sanksi ekonomi UE, dapat diidentifikasi menggunakan teori Realisme dan dua konsep, yakni *power* dan *Balance of Power*.

Ketegangan ekonomi akibat sanksi ekonomi UE menempatkan Rusia pada posisi krisis ekonomi yang mengancam kelangsungan hidup (*survival*) dan keamanan nasional (*security*) negaranya. Ketegangan tersebut memperluas dampak sanksi ekonomi UE, yakni mempengaruhi dinamika perdagangan kedua pihak. Akibat ketegangan ekonomi tersebut, perdagangan Rusia jauh lebih rendah dengan UE. Akibatnya, Rusia berada pada neraca perdagangan negatif. Rendahnya perdagangan Rusia dari UE dalam perdagangan kedua pihak disimpulkan bahwa UE akan mendominasi perdagangan Rusia dan UE. Hal tersebut mempertegas dampak kerugian bagi Rusia.

Kelangsungan hidup (*survival*) Rusia serta keamanan nasional (*security*) khususnya sektor finansial, mendorong Rusia untuk merespon sanksi ekonomi UE. Respon Rusia terhadap sanksi ekonomi UE tidak menggunakan kekuatan militer, melainkan menggunakan kekuatan ekonomi berupa *economic statecraft*, yakni sanksi negatif. *Economic statecraft* yang dilakukan Rusia adalah sanksi negatif berupa embargo produk agrikultur dan makanan negara-negara anggota UE selama satu tahun.

6. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Reny. (2014). Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar dan Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2008-2012. Diperoleh dari:

Bebler, Anton. (2015). *Crimea and The Russian-Ukrainian Conflict*. Diperoleh dari: http://www.atlanterhavskomiteen.no/files/dnak/Documents/Publikasjoner/2015/Spb_1-15.pdf Diakses pada tanggal 01 Desember 2017

Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Buzan, Barry. (1991). *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*. Internasional Affairs. Pp. 432-451.

Cooper, Richard N. (2004). *Is "Economic Power" a Useful and Operational Concept?* Diperoleh dari: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3677050/Cooper_EconomicPower.pdf?sequence=3 Diakses pada tanggal 21 Maret 2018

European Parliamentary. (2016). *Russia: Economic Indicators and Trade with EU*. Diperoleh dari: <https://epthinktank.eu/2016/05/24/russia-economic-indicators-and-trade-with-eu/> Diakses pada tanggal 26 Desember 2017

Gros, Daniel & Mustilli, Federica. (2016). *The Effects of Sanctions and Counter-Sanctions on EU-Russian Trade Flows*. Diperoleh dari: <https://www.ceps.eu/publications/effects-sanctions-and-counter-sanctions-eu-russian-trade-flows> Diakses pada tanggal 20 Desember 2017

Gros, Daniel & Salvo, Mattia Di. (2017). *Revisiting Sanctions on Russia and Counter-Sanctions on the EU: The Economic Impact Three Years Later*. Diperoleh dari: https://www.ceps.eu/system/files/CEPS%20Commentary_Sanctions%20on%20Russia%20_Gross_Di%20Salvo.pdf Diakses pada tanggal 27 Desember 2017

Jackson, Robert H & Sorensen, Georg. (2013). *Introduction to International Relations*. Diterjemahkan ke dalam bahasa

- Indonesia oleh Dadan Suryadiputra & Pancasari Suyatiman, 2013. Oxford: Oxford University Press.
Diakses pada tanggal 29 Desember 2017
- Jones, Walter S. (1998). *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan Ekonomi-Politik Internasional dan Tatahan Dunia 2*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Kamasa, Frassminggi. (2014). *Ukraine's Crisis and Its Impact Towards Global and Regional Political System*. Diperoleh dari: <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/index/index>
Diakses pada tanggal 15 September 2017
- Kapsdorferova, Zuzana & Sviridova, Olga. (2014). Impact of Sanctions on Agricultural Policy in European Union and Russia. Diperoleh dari: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2016/proceedings/en/articles/s3/kapsdorferova_sviridova2.pdf
Diakses pada tanggal 21 Mei 2018
- Kasmin. (2015). *Upaya Iran Mengatasi Embargo Minyak Uni Eropa*. Diperoleh dari: <http://happyslide.top/doc/84878/upaya-iran-dalam-mengatasi-embargo-minyak-uni-eropa>
Diakses pada tanggal 01 Januari 2018
- Marxsen, Christian. (2014). *The Crimea Crisis: An International Law Perspective*. Diperoleh dari: http://www.mpil.de/files/pdf4/Marxsen_2014_-_The_crimea_crisis_-_an_international_law_perspective.pdf
Diakses pada tanggal 17 September 2017
- Mingst, Karen. (2003). *Essentials of International Relations*. University of Kentucky. New York: London
- Merezhko, Oleksandr. (2015). *Crimea's Annexation by Russia-Contradictions of the New Russian Doctrine of Internal Law*. Diperoleh dari: http://www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_167_194.pdf
Diakses pada tanggal 17 September 2017
- Nevskaya, A. (2015). *Russia-EU Economic Relations: Assessing Two Years of Sanction*. Diperoleh dari: <http://www.russia-direct.org/analysis/russia-eu-economic-relations-assessing-two-years-sanctions>.
Diakses pada tanggal 16 April 2018
- Paul, T.V, Wirtz, James J & Fortmann, Michel. (2004). *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. California: Stanford University
- Raimzhanova, Aigerim. (2015). *Power in IR: Hard, Soft, Smart Power*. Diperoleh dari: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf
Diakses pada tanggal 07 April 2018
- Sheehan, Michael. (1996). *The Balance of Power: History & Theory*. London: News Fetter Lane.
- Simola, Heli. (2015). *Russia's International Reserves and Oil Funds*. Diperoleh dari: [https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/13669/bpb0415\[1\].pdf?sequence=1](https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/13669/bpb0415[1].pdf?sequence=1)
Diakses pada tanggal 29 Desember 2017
- Veebel, Viljar. (2015). *Lesson from The Eu-Russia Sanctions 2014-2015*. Diperoleh dari: <https://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2015.8.issue-1/bjlp-2015-0015/bjlp-2015-0015.xml>
Diakses pada tanggal 16 Agustus 2017
- Wenger, Andreas & Zimmerman Doron. (2003). *International Relations: From the Cold War to the Globalized World*. Lynne Rienner, USA.

